



Disdukcapil Bersiap Verifikasi Penduduk

YOGYAKARTA – Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih dua tahun lagi. Namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta mulai menyiapkan tahapan pendataan kependudukan sebagai bekal menyusun daftar pemilih mendatang.

"Sejak dini kami susun program yang akan dilaksanakan untuk mendata kependudukan di Kota Yogyakarta," kata Kepala Disdukcapil Yogyakarta, Sisruwadi, usai rapat kerja bersama Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, kemarin.

Metode yang akan ditempuh adalah program layanan jemput bola kependudukan. Sasaran utamanya ialah warga yang tinggal dan menetap di Kota Yogyakarta namun belum masuk

dalam database kependudukan. Di antaranya anak atau remaja usia di bawah 17 tahun, penduduk rentan, dan penduduk nonpermanen.

"Khusus bagian usia di bawah 17 tahun atau pelajar SMA, kami akan maksimalkan kepemilikan kartu identitas anak (KIA). Karena mereka pada 2019 nanti sudah memiliki hak pilih," katanya.

Sedangkan bagi penduduk rentan, akan difokuskan pada orang terlantar yang biasanya tinggal dan menetap di panti asuhan atau rumah singgah. Mereka bakal diterbitkan surat keterangan orang terlantar (SKOT). Nantinya, Disdukcapil akan minta pengasuh panti asuhan atau rumah singgah agar mendata warga asuhannya secara faktual.

Ke Hal 14

hapan yang akan dilakukan itu bertujuan agar semua penduduk yang tinggal dan menetap di Kota Yogyakarta masuk dalam database kependudukan.

"Dengan masuk dalam data kependudukan, maka yang bersangkutan memiliki hak pilih. Sehingga data pemilih dalam Pileg dan Pilpres 2019 akan jauh lebih baik," katanya. Sementara itu, anggota

(Dari Hal 13

Penduduk rentan yang mengantongi SKOT selanjutnya akan dipantau dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Jika dalam setahun masih menetap di Kota Yogyakarta maka akan dimasukkan dalam data kependudukan. "Namun prosesnya baru akan dimulai awal 2018. Tahun ini kami matangkan dulu programnya," katanya.

Sementara bagi penduduk nonpermanen, pada tahun ini sudah dilakukan pendataan. Yaitu penduduk luar daerah yang tinggal di Kota Yogyakarta namun tidak mengurus dokumen mutasi kependudukan. Sesuai aturan, penduduk yang sudah menetap di Kota Yogyakarta selama enam bulan wajib mutasi kependudukan.

Menurut Sisruwadi, ta-

buatan KIA mobile yang dilakukan bekerja sama dengan sekolah diprioritaskan untuk remaja SMA karena sekaligus untuk pendataan penduduk potensial pemilih pemula. "Kami harap ada penyempurnaan pendataan dan administrasi penduduk sehingga mampu disuguhkan data penduduk yang valid," tandasnya.

• ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005